



LIST REGULASI ATURAN COVID-19

NO	JENIS	NOMOR	TAHUN	TENTANG
1.	UU	4	1984	WABAH PENYAKIT MENULAR
2.	UU	24	2007	PENANGGULANGAN BENCANA
3.	UU	36	2009	KESEHATAN
4.	UU	6	2018	KEKARANTINAAN KESEHATAN
5.	PERPU	1	2020	KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
6.	PP	40	1991	PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR
7.	PP	21	2020	PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
8.	PEPPRES	72	2012	SISTEM KESEHATAN NASIONAL
9.	PEPPRES	52	2020	PEMBANGUNAN FASILITAS OBSERVASI DAN PENAMPUNGAN DALAM PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) ATAU PENYAKIT INFEKSI EMERGING DI PULAU GALANG, KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU
10.	PEPPRES	54	2020	PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN

				ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
11.	INPRES	4	2020	REFOCUSING KEGIATAN, REALOKASI ANGGARAN, SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KEPPRES				
12.	KEPPRES	7	2020	GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
13.	KEPPRES	9	2020	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
14.	KEPPRES	11	2020	PENETAPAN KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PERMEN				
15.	PERMENKES	82	2014	PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
16.	PERMENKES	9	2020	PEDOMAN PEMBatasan SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
17.	PERMENKEU	19/PMK.072020	2020	PENYALURAN DAN PENGUNAAN DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA INSENTIF DAERAH

				TAHUN ANGGARAN 2020 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
18.	PERMENKEU	23/PMK.03/2020	2020	INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA
19.	PERMENDAGRI	20	2020	PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
20.	PERMENDAGRI	10	2020	LARANGAN SEMENTARA IMPORT BARANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
21.	PERMENKUHAM	7	2020	PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN MASUKNYA VIRUS CORONA
22.	PERMENKUHAM	3	2020	PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN, VISA, DAN PEMBERIAN IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA BAGI WARGA NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
23.	PERMENKUHAM	8	2020	PENGHENTIAN SEMENTARA BEBAS VISA KUNJUNGAN DAN VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN SERTA PEMBERIAN IZIN TINGGAL KEADAAN TERPAKSA
SURAT EDARAN				
24.	KETUA MA	1	2020	PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI

				LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
25.	KETUA MA	2	2020	PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG
26.	SE SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG	1	2020	PENYESUAIAN SISTEM KERJA HAKIM DAN APARATUR PERADILAN DALAM UPAYA PENCEGGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN LAINNYA
27.	MENKEU	SE-6/MK.02/2020	2020	REFOCUSING KEGIATAN DAN REALOKASI ANGGARAN KEMENTRIAN/LEMBAGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
28.	KEMENHUB	14	2020	PENGEMBANGAN PROSEDUR PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL GUNA PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
29.	KEMENHUB	AU.304//1/4//DNP-2020	2020	PENCABUTAN NOTAM

30.	MENDIKBUD	3	2020	PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) PADA SATUAN PENDIDIKAN
31.	MENDIKBUD	4	2020	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
32.	KEMENKES	HK.02.02/II/753/2020	2020	REVISI KE-3 PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
33.	KEMENKES	HK.02.01/MENKES/202/2020	2020	PROTOKOL ISOLASI DIRI SENDIRI DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
34.	KEMENKES	HK.02.01/MENKES/216/2020	2020	PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID 19) DI TEMPAT KERJA
35.	KEMENKES	SR.02.02II/270/2020	2020	PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (2019-nCOV)
36.	KEMENKES	SR.03.04/II/641/2020	2020	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERKAIT PERKEMBANGAN COVID-19
37.	KEMENKES	PK.02.01/B.VI/839/2020	2020	HIMBAUAN TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN
38.	MENAKER	M/1/HK.04/II/2020	2020	PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING YANG BERASAL DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DALAM RANGKA PENCEGAHAN WABAH PENYAKIT YANG

				DIAKIBATKAN OLEH VIRUS CORONA
39.	MENAKER	M/3/HK.04/III/2020	2020	PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19
40.	MENAKER	M/3/HK.04/III/2020	2020	PERLINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19
41.	KEMEN AGAMA	6	2020	PANDUAN IBADAH RAMADAN DAN IDUL FITRI 1 SYAWAL 1441 H DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19
42.	SE GUBERNUR YOGYA	2/SE/III/2020	2020	PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RISIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DARI PENDATANG/PEMUDIK KE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
43.	SE GUBERNUR DKI	2/SE/2020	2020	PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PRIVINSI DKI JAKARTA
44.	SE KABAG DKI	12/SE/2020	2020	ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA ATAU COVID 19
45.	SE GUBERNUR JABAR	400/27/HUKHAM	2020	PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID)

46.	SE GUBERNUR JABAR	400/26/HUKHAM	2020	PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP RESIKO PENULARAN INFEKSI <i>CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID)</i>
47.	SE GUBERNUR JABAR	443/22/HUKHAM	2020	PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KORDINASI <i>CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID)</i> DAERAH KABUPATEN KOTA DI JAWA BARAT
48.	SE GUBERNUR JABAR	400/25/UM	2020	PENUTUPAN SEMENTARA FASILITAS UMUM DAN PENUNDAAN SEMENTARA KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
49.	SE SEKDA JABAR	443/46/UM	2020	PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA FASILITAS UMUM DAN PENUNDAAN SEMENTARA KEGIATAN TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
50.	SE SEKDA JABAR	800/30/BKD	2020	PENYESUAIAN SISTEM KERJA ASN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT
51.	SE SEKDA JABAR	800/47/BKD	2020	PERPANJANGAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA ASN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID 19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT

52.	KAPUSKES	HJ.01.01/2/946/2020	2020	UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) KEPADA SELURUH JEMAAH HAJI INDONESIA
53.	WALIKOTA BEKASI	440/2301/DINKES	2020	ISOLASI KEMANUSIAAN TERHADAP WARGA KOTA BEKASI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
54.	WALIKOTA BEKASI	440/2285/DINKES	2020	PENATALAKSANAAN PASIEN TERDUGA COVID-19
55.	WALIKOTA BEKASI	440/2286/DINKES	2020	LARANGAN RUMAH SAKIT SWASTA MERUJUK PASIEN COVID-19 WARGA KOTA BEKASI KE RUMAH SAKIT LUAR KOTA BEKASI
56. 23.	WALIKOTA BEKASI	556/2306- Parbud.Par	2020	PERPANJANGAN PENUTUPAN SEMENTARA TEMPAT HIBURAN DAN USAHA JASA PARIWISATA LAINNYA DI KOTA BEKASI
57.	WALIKOTA BEKASI	469//2320/SETDA.TU	2020	PELAKSANAAN PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19 DI KOTA BEKASI
58.	BSNP	0113/SDAR/BSNP/III/2020	2020	PROTOKOL PELAKSANAAN UN TAHUN 2019/2020 UNTUK PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19
59.	BSNP	0114/SDAR/BSNP/III/2020	2020	PELAKSANAAN UN TAHUN 2020 TERKAIT PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
60.	DIRJEN DIKTI	262/E.E2/KM/2020	2020	PEMBELAJARAN SELAMA MASA DARURAT PANDEMI COVID-19
61.	KIP	2	2020	PELAYANAN INDORMASI PUBLIK DALAM MASA DARURAT KESEHATAN MASYARAKAT AKIBAT

				CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
SK				
62.	SK MENKES	HK.01.07/MENKES/182/2020	2020	JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
63.	SK MENKES	HK.01.07/MENKES/104/2020	2020	PENETAPAN INFEKSI NOVEL CORONAVIRUS (INFEKSI 2019-n-CoV) SEBAGAI PENYAKIT YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
64.	SK MENKES	HK.01.07/MENKES/214/2020	2020	JEJARING LABORATORIUM PEMERIKSAAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
65.	SK MENKES	HK.01,07/MENKES/239/2020	2020	PENETAPAN PEMBATAAN SOSIOAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
66.	SK MENKEU	6/KM.7/2020	2020	PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
67.	SK GUB YOGYA	65/KEP/2020	2020	PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

68.	SK GUBERNUR JAWA BARAT	443/Kep.199-Hukham/2020	2020	GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGUGALANG CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI JAWA BARAT
69.	SK GUBERNUR JAWA BARAT	443/Kep.192-Dinkes/2020	2020	PENETAPAN LABORATORIUM KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI LABORATORIUM Pemeriksaan CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
70.	SK GUBERNUR JAWA BARAT	443/Kep.189-Hukham/2020	2020	STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT WABAH PENYAKIT CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI JAWA BARAT
71.	SK GUBERNUR JAWA BARAT	445/Kep.186-Dinkes/2020	2020	PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU
72.	SK MENKOMINFO	159	2020	UPAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) MELALUI DUKUNGAN SEKTOR POS DAN INFORMATIKA
73.	SK KEPALA BNPB	9.A	2020	PENETAPAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA
74.	SK KEPALA BNPB	13.A	2020	PERPANJANGAN STATUS KEADAAN TERTENTU DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT VIRUS CORONA DI INDONESIA
Surat Telegram				
75.	SURAT TELEGRAM	ST/1100/IV/HUM.7.1/2020	2020	SIBER

76.	SURAT TELEGRAM	ST/1099/IV/HUM.7.1/2020	2020	BAHAN POKOK
77.	SURAT TELEGRAM	ST/1098/IV/HUM.7.1/2020	2020	PSBB
LAIN-LAIN				
78.	LAMPIRAN PEPPRES	5	2020	PERUBAHAN POSTUR DAN RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020
79.	POJK	11/POJK.03/2020	2020	STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTERCYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019
80.	HIMBAUAN PEMKOT YOGYAKARTA	443/102	2020	PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS KORONA
81.	INSTRUKSI GUBERNUR JABAR	400/02/Hukham	2020	PENGAMBILAN SPESIMEN <i>CORONAVIRUS DESEASE-19</i>
82.	MAKLUMAT KAPOLRI	Mak/2/III/2020	2020	KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
83.	LAMPIRAN MABES POLRI	B/1872/III/Res.2.1/2020/ Bareskrim	2020	PENGAWASAN KETERSEDIAAN BAPOKTING
84.	FATWA	14	2020	PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADI WABAH COVID-19
85.	KETERANGAN PERS	007/HUMAS/KH/III/2020	2020	SUDAH SAATNYA KARANTINA WILAYAH DILAKUKAN